

PENGARUSUTAMAAN GENDER

2023

PERDA KAB.LEBAK NO.5, LD 2023/ NO. 5, 23 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NO.5 TAHUN 2025 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

- ABSTRAK : – Bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi hak dasar setiap masyarakat Kabupaten Lebak dengan meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak hak warga negara di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa adanya diskriminasi melalui penyetaraan peran masyarakat dalam strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dengan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri No.67 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengarusutamaan Gender; Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki. Dalam perencanaan pengarusutamaan gender, Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender. Peraturan ini berisi beberapa BAB diantaranya BAB I tentang Ketentuan Umum; BAB II tentang Perencanaan; BAB III tentang Pelaksanaan; BAB IV tentang Pelembagaan PUG; BAB V tentang Peran Serta; BAB VI tentang Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi; BAB VII tentang Pembinaan; BAB VIII tentang Pendanaan; BAB IX tentang Ketentuan Penutup.
- Catatan : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Juli 2023.
- Penjelasan : 5 hlm